

Jurnal Pewarta Indonesia

Volume 4 No 1 – 2022, page 12-27
Available online at <http://pewarta.org>

Komunikasi Politik Dinasti dalam Meningkatkan Elektabilitas Pilkada Tangerang Selatan 2020

Irma Fika Adita¹ Poppy Ruliana^{2*}

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi
Jl. Wijaya II No. 62 Jakarta 12160 - Indonesia

*Email korespondensi: poppyruliana@stikom.interstudi.edu

DOI: <http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v4i1.96>

Submitted: 24 Februari 2022 Revised: 16 April 2022 Published: 30 April 2022

Abstract

This study analyzes the political communication of the Ratu Atut family dynasty in increasing the electability of Benjamin-Pilar Saga in the South Tangerang regional head election in December 2020. The goal of this study is to critically investigate the Ratu Atut family dynasty's political communication process in enhancing the electability of Benjamin-Pilar Saga in the South Tangerang regional election, which is still underway today. The concept of political communication is used to explain the communication process carried out by family dynasties in increasing electability in general elections so that the theory of political dynasties and the concept of electability are also needed. This research is based on phenomenology with the case study research method. Collecting data through the stages of observation, in-depth interviews, library reviews, documentation, and searching through the internet. The stages of data reduction, display, and diversification/conclusion were used to do data analysis. The following are the study's findings: First, Benjamin-Pilar, who originates and/or has become a local political force rooted in South Tangerang, has stronger popularity and electability compared to newly emerged figures with little track records. visible and known to constituents. Second, Benjamin-Pilar with the support of the Ratu Atut family dynasty has advantages in the form of family connections, financial resources, and networks, as well as symbiotic relationships with political parties, so that they have more communicators/messengers in political communication. Third, during the elections, communicators employ mainstream media, social media, and direct campaigns (door to door) to conduct various forms of political communication. Fourth, the political factor of money dominates the willingness of citizens/voters to vote, not because of the awareness that is awakened by an adequate degree of political literacy.

Keywords: Political Dynasty, Democracy, Electability, Political Communication, Regional Head Election

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis proses komunikasi politik keluarga Ratu Atut dalam meningkatkan elektabilitas Benjamin-Pilar Saga dalam Pilkada Tangerang Selatan, Desember 2020. Konsep komunikasi politik digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi yang dijalankan oleh dinasti keluarga dalam meningkatkan elektabilitas di pemilihan umum, sehingga teori dinasti politik dan konsep elektabilitas juga diperlukan. Penelitian ini didasarkan pada fenomenologi dan menggunakan metode penelitian studi kasus. Observasi, diskusi mendalam, tinjauan pustaka, dokumentasi, dan penelusuran internet digunakan untuk memperoleh data. Tahapan reduksi data, display, dan diversifikasi/kesimpulan digunakan untuk melakukan analisis data. Temuan penelitian adalah: *Pertama*, Benyamin-Pilar yang berasal dan/atau sudah menjadi kekuatan politik lokal yang mengakar di Tangerang Selatan, memiliki popularitas dan elektabilitas yang lebih kuat dibanding dengan figur yang baru muncul dengan rekam jejak yang belum banyak terlihat dan diketahui oleh konstituen. *Kedua*, Benyamin-Pilar dengan dukungan dinasti keluarga Ratu Atut, memiliki keunggulan berupa koneksi keluarga, sumber daya uang dan jaringan, serta hubungan simbiosis dengan partai politik, sehingga memiliki lebih banyak komunikator/pembawa pesan dalam komunikasi politik yang dijalankan. *Ketiga*, para komunikator memanfaatkan media massa, media sosial, dan kampanye langsung (*door to door*) untuk menjalankan berbagai bentuk

komunikasi politik selama pilkada. *Keempat*, faktor politik uang mendominasi kesediaan warga untuk memilih, bukan karena kesadaran yang terbangun oleh derajat literasi politik yang memadai.

Kata kunci: Dinasti Politik, Demokrasi, Elektabilitas, Komunikasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah

Pendahuluan

Komunikasi adalah dasar dari semua aktivitas sosial dan politik (Fagen, 1966). Melalui komunikasi politik, pemerintah menyampaikan pesannya kepada masyarakat, partai politik untuk mensosialisasikan programnya, dan masyarakat dapat memberikan tanggapan atas pesan yang diterimanya. Dalam demokrasi pasca 1998, terjadi benturan kepentingan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Salah satu bentuk benturan kepentingan datang dari fenomena dinasti politik, sehingga proses komunikasi politik yang demokratis berhadapan dengan kekuatan dinasti politik (McNair, 2017).

Politisi dinasti dalam demokrasi yang terkonsolidasi dapat merebut jabatan publik - untuk menciptakan, memperkuat, atau memperluas basis kekuatan mereka - melalui proses pemilihan umum, tetapi dengan menggunakan metode antidemokrasi (Kenawas, 2015). Dengan demikian, kemampuan politisi untuk membangun, mengkonsolidasikan, dan menumbuhkan dinasti politik ditentukan oleh kekuatan jaringan keluarga informal dan jumlah akumulasi kekayaan finansial yang dikumpulkan melalui status *incumbent*. Kedua faktor ini sangat membantu keluarga dinasti dalam menciptakan arena persaingan yang mempersulit pesaing untuk merebut atau memenangkan jabatan di tingkat subnasional (Kenawas, 2015).

Unsur-unsur demokrasi seperti pemilihan umum yang kompetitif, penghormatan terhadap kebebasan sipil, dan komitmen para aktor terhadap demokrasi sebagai satu-satunya saluran yang memungkinkan untuk transisi politik tetap ada, tetapi lapangan bermain sangat condong ke arah petahana (Levitsky & Way, 2010).

Selama 15 tahun terakhir, transfer

kekuasaan dari pejabat terpilih kepada anggota keluarga mereka sendiri telah meningkat pesat, kecuali reformasi pemilu yang signifikan dilaksanakan dengan cepat, tren ini kemungkinan akan berlanjut. Kini, begitu banyak anggota keluarga elit politik bersaing dalam pemilihan daerah. Dari 2015 hingga 2018, sebanyak 117 politisi dinasti memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada), sementara 85 lainnya kalah.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan tajam dari 39 politisi dinasti yang menduduki kantor eksekutif di tingkat subnasional pada akhir 2013. Perkembangan terbaru pada Pilkada 2020, kontestasi tidak hanya melibatkan dinasti lokal, tetapi juga menarik anggota keluarga elit nasional. Putra dan menantu Presiden Joko Widodo bersaing dalam mendapatkan kursi walikota di Solo dan Medan.

Juga terjadi peningkatan jumlah politisi dinasti, dari 52 orang dalam pilkada 2015, menjadi 124 orang pada tahun 2020. Beberapa calon kepala daerah dari dinasti politik juga menang dalam pemilihan tersebut. Jumlah suara politisi dinasti melebihi jumlah saingan mereka. Pasangan calon (paslon) Benjamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan mengungguli dua sandingan calon dalam Pilkada Tangerang Selatan, Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan Siti Nur Azizah-Ruhmaben.

Dalam memenangkan kontestasi pilkada, para politisi dinasti menempuh berbagai jalan yang berdampak pada proses komunikasi politik ideal sebagai negara demokrasi. Dinasti politik membawa corak tersendiri bagi perkembangan komunikasi politik di Indonesia.

Berikut adalah nama-nama politisi dinasti politik yang berjaya pada Pilkada tahun 2020 (Gambar 1):



Gambar 1. Politisi Trah Politik di Pemilihan Kepala Daerah 2020

Keluarga Ratu Atut telah diidentifikasi sebagai salah satu simbol dinasti politik yang kekuatan dan pengaruhnya signifikan. Setidaknya sebelas anggota keluarga Ratu Atut menduduki berbagai jabatan publik. Sementara itu, popularitas dan elektabilitas selalu menjadi elemen penting untuk dipertimbangkan para pemilih. Pentingnya “elektabilitas” telah mencapai ketinggian baru dalam siklus pilkada Tangerang Selatan, 2020.

Untuk mengalahkan dinasti politik keluarga Ratu Atut, koalisi berbagai partai dengan latar belakang dinasti politik yang juga kuat, ikut dalam Pilkada Tangerang Selatan 2020. Mereka yang bertarung adalah: Siti Nur Azizah, anak Wakil Presiden Ma’aruf Amin, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo keponakan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, dan Pilar Saga Ichsan, anak Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, keluarga dekat Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Provinsi Banten selama dua periode. Benjamin Davnie, calon petahana, adalah Wakil Walikota

Tangerang Selatan dan menjabat dua periode bersama Airin Rachmy Diany, kerabat Ratu Atut. Pilar Saga tidak lain adalah keponakan Airin.

Penelitian tentang dinasti politik keluarga Ratu Atut bukanlah hal baru. Taktik komunikasi politik dalam pilkada dengan studi kasus kemenangan pasangan calon Ratu Atut dan Rano Karno pada Pilkada Banten tahun 2011 misalnya, telah dimuat di sejumlah publikasi jurnal ilmiah (Rosit, 2012). Gejala dinasti politik Banten menjamur di bawah kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah (Sutisna, 2017).

Studi tentang pemberitaan media politik dinasti di keluarga Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dengan menggunakan analisis framing isu politik di harian Kompas dan koran Tempo (Budiyono, 2017), sustainabilitas pembangunan politik dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten (Salam, 2016), dan *The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society* (Kenawas, 2015), merupakan studi-studi yang membahas dinasti politik Ratu Atut di Banten.

Dari beberapa penelitian terdahulu

tersebut, peneliti melihat belum ada penelitian serupa yang fokus pada komunikasi politik dinasti keluarga Ratu Atut dalam meningkatkan elektabilitas Benyamin-Pilar di Pilkada Tangerang Selatan, 2020. Komunikasi politik keluarga dinasti dalam arena pemilihan umum, penting dianalisa mengingat latar belakang kandidat berpengaruh terhadap elektabilitas.

Modal politik yang sudah melekat selama beberapa generasi tersebut digunakan oleh para komunikator untuk membawa pesan-pesan politik tertentu kepada pemilih guna meningkatkan elektabilitas kandidat keluarga dinasti. Dalam kaitan itu, masalah yang dijadikan bahan riset adalah mendeskripsikan komunikasi politik dinasti Ratu Atut dalam meningkatkan elektabilitas Benyamin-Pilar di pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan 2020.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam komunikasi politik dinasti Ratu Atut dalam meningkatkan elektabilitas Benyamin-Pilar di Pilkada Tangerang Selatan 2020.

Kerangka Teori

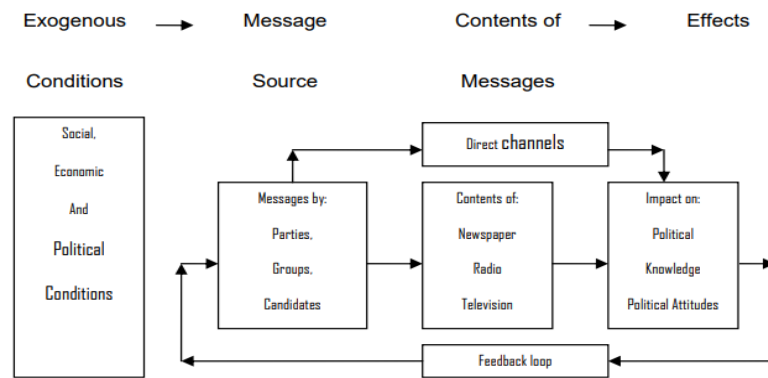
Dari perspektif sistem sosial, komunikasi politik dapat digambarkan sebagai hubungan yang berkelanjutan antara institusi dan aktor politik, institusi dan aktor media, dan orang-orang sebagai warga negara, pemilih dan konsumen media. Dengan demikian, menurut Blumler dan Gurevitch, komponen utama sistem komunikasi politik dapat ditempatkan pada: (1) dalam hal komunikasi, institusi politik; (2) forum media dalam aspek politiknya; (3) sikap massa terhadap komunikasi politik, dan (4) sudut pandang komunikasi yang relevan dengan budaya politik

(Blumler et al., 1995). Oleh karena itu, selama ada aspek komunikasi dari institusi politik, atau aspek politik dari institusi media, atau kekuatan politik dan legitimasi dimenangkan melalui proses yang terbuka dan demokratis, maka politik dan media tidak akan dapat dipisahkan.

Berbagai rumusan komunikasi politik oleh beberapa ahli menyiratkan adanya beberapa dimensi. Smith melihatnya sebagai proses di mana keadaan sosial, ekonomi, dan politik menjadi latar belakang bagi partai politik, kelompok kepentingan, dan kandidat untuk mengomunikasikan pesan mereka (Denton & Woodward, 1998), sedangkan McNair melihatnya sebagai hubungan dari berbagai elemen (McNair, 1999).

Komunikasi politik, menurut Craig Allen Smith, adalah proses negosiasi orientasi komunitas melalui interpretasi dan karakterisasi kepentingan, relasi kuasa, dan peran komunitas di dunia (Denton & Woodward, 1998). Definisi ini menjelaskan bagaimana proses negosiasi suatu komunitas tentang kepentingan hubungan kekuasaan terjadi. Dalam proses ini, terjadi proses tarik-menarik orientasi melalui proses interpretasi minat.

Proses negosiasi ini dapat terjadi dengan sangat cepat tetapi dapat juga terjadi dengan sangat lambat tergantung pada peran yang dimainkan oleh para aktor dalam masyarakat selain kemampuan mereka untuk menerjemahkan kepentingan dalam relasi kekuasaan mereka. Selain proses negosiasi, komunikasi politik juga diartikan sebagai proses interaksi migrasi informasi antara politisi, media berita, dan publik (Smelser & Baltes, 2001). Menurut Smelser dan Baltes, model sistem proses komunikasi politik dapat dijelaskan sebagai berikut (Gambar 2):



Gambar 2. Proses Komunikasi Politik.

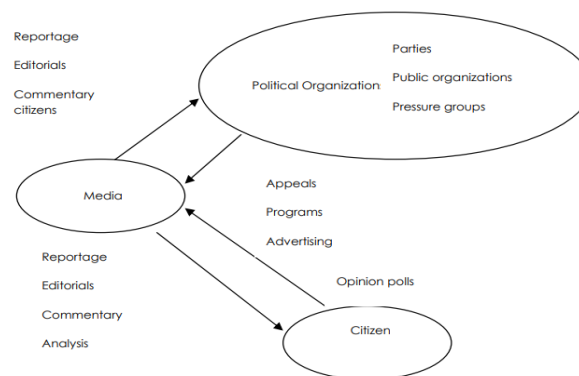
Sumber: Ispandriarno, 2008, Smelser & Baltes, 2001

Munculnya amanat yang disampaikan oleh partai politik, kelompok, atau kandidat dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik. Melalui saluran langsung, pesan dari surat kabar, radio, televisi, dan internet disalurkan kepada individu maupun masyarakat yang akan berpengaruh pada pengetahuan politik, sikap politik, dan perilaku politik mereka.

Brian McNair mendefinisikan komunikasi politik sebagai hubungan antara berbagai elemen, yaitu organisasi politik, media, dan warga negara (McNair, 1999). Komunikasi politik adalah komunikasi yang ditujukan ke arah politik, dan terdiri dari unsur-unsur: (1) metode komunikasi apa pun yang digunakan oleh politikus dan pelaku politik lainnya untuk

menggapai tujuan tertentu; (2) non-politisi, seperti pembaca surat kabar dan kolumnis, yang berkomunikasi dengan aktor-aktor ini; dan (3) laporan berita, editorial, dan jenis komentar media lainnya tentang masalah politik berisi informasi tentang orang-orang ini dan aktivitas mereka.

McNair juga memasukkan wacana diplomasi, sehingga komunikasi politik tidak semata mata berupa pernyataan lisan atau tertulis tetapi juga cara visual untuk menandakan hal-hal lain seperti seragam, tata rias, gaya rambut, dan logo yang kesemuanya merupakan elemen komunikasi yang dapat digunakan untuk membentuk “gambar” atau identitas politik. Berikut ini adalah tiga unsur komunikasi politik (Gambar 3):



Gambar 3. Hubungan Tiga Elemen Komunikasi Politik (McNair, 2017)

Ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bagaimana faktor budaya mempengaruhi komunikasi politik seperti dikemukakan oleh Heisy (Gonzales & Tanno, 1997). Penelitian itu menyatakan, prinsip budaya tertentu dapat diungkapkan melalui analisis materi budaya. Satu budaya subjektif harus menembus pernyataan seseorang (Gonzales & Tanno, 1997).

Pada buku *Metode untuk Penelitian Komunikasi Antarbudaya*, Starosta menjelaskan penggunaan teknik analisis simbolik Burke untuk mengungkap motif ("faktor") seorang komunikator. Kesimpulan Starosta pada pidato publik yang membuka ajaran budaya diantisipasi oleh Olivier dalam *Komunikasi dan Kebudayaan di India Kuno dan Cina*. Olivier mengatakan, premis studinya adalah "retorika berbasis budaya" bahwa "retorika melekat dalam filosofi dan cara hidup para praktisi", termasuk pidato pribadi dan publik.

Dalam *Arah Baru dalam Komunikasi Politik: Buku Sumber*, Swanson dan Nimmo memiliki pemahaman yang lebih maju tentang bagaimana suatu budaya mempengaruhi dan mengekspresikan dirinya dalam komunikasi politik dengan dua cara. *Pertama*, mengidentifikasi bidang kedua dari penelitian komunikasi politik seperti studi budaya neo-Marxis yang berada di luar paradigma persuasi pemilih, dan ini memicu pertanyaan tentang arus utama penelitian ini.

Ada perbedaan yang meningkat dalam penelitian ini. Kritik retorik dan ahli teori yang mewakili tradisi tertua dalam penelitian utama memberikan perhatian lebih pada pemahaman tentang dimensi politik daripada budaya populer. Mengacu pada buku *New Direction*, Aaron Wildavsky berpendapat, budaya memainkan peran sebagai filter sosial, dan memungkinkan orang membangun preferensi politik. Perspektif ini penting untuk memahami bagaimana faktor budaya mempengaruhi komunikasi politik di dalam dan di antara sistem yang berbeda.

Teori Dinasti Politik

Studi sebelumnya mendefinisikan dinasti politik dengan berbagai cara. Dal Bó mendefinisikan dinasti politik -berasal dari keluarga yang sebelumnya telah menempatkan anggota di Kongres (Bó et al., 2009). Ishibashi dan Reed dan Asako *et al.*, dinasti politik digambarkan sebagai sekumpulan politikus yang mendapat posisi di masyarakat dari anggota keluarga mereka yang memegang posisi itu (Asako et al., 2015; Ishibashi & Reed, 1992).

Menurut Thompson, dinasti politik hanyalah jenis transfer kekuasaan politik langsung dan tidak langsung termasuk anggota keluarga (Thompson, 2012). Selain itu, dinasti politik, menurut Querubin, adalah satu atau sejumlah kerabat yang mengontrol pembagian otoritas di wilayah geografis tertentu (Querubin, 2011).

Definisi yang lebih ketat diberikan Hess (1966). Dia mengemukakan, dinasti politik sebagai keluarga yang memiliki setidaknya empat anggota, dengan nama yang sama, dipilih untuk menjabat sebagai pejabat federal. Definisi ini berguna tetapi tidak dapat menangkap variasi penting yang berdasarkan penelitian ini di pengamatan awal, mungkin terjadi. Definisi ketat Hess tentang dinasti politik juga bermasalah karena beberapa alasan. *Pertama*, di banyak negara nama keluarga mungkin bukan bagian dari tradisi lokal. Misalnya, di Indonesia, ada orang yang memiliki nama tunggal, tanpa nama keluarga. Banyak anggota dinasti politik yang tidak memiliki nama keluarga yang sama dengan para pendiri dinasti. *Kedua*, Hess menetapkan, setidaknya empat anggota keluarga harus dipilih untuk berbagai posisi publik. Definisinya bermasalah karena tidak menangkap varian dinasti politik yang saat ini memiliki kurang dari empat anggota yang berhasil mengamankan jabatan publik.

Dalam studi ini, dinasti politik diartikan sebagai pejabat publik terpilih (gubernur/walikota/bupati/legislator) yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan petahana di tingkat yang sama, lebih

rendah, atau lebih tinggi (kabupaten ke provinsi) berdasarkan hubungan perkawinan, garis keturunan vertikal, atau diperpanjang keluarga. Pejabat ini dapat dipilih selama masa jabatan petahana atau pada periode berikutnya. Definisi ini tidak hanya mencakup jangka waktu yang luas untuk suksesi kantor tetapi juga perluasan kekuasaan keluarga ke cabang eksekutif dan legislatif lainnya.

Elektabilitas

Dalam pemilihan umum, popularitas kontestan dan karisma pribadi (Buehler, 2009), politik dengan menggunakan uang dan harta kekayaan (Hidayat, 2009), taktik propaganda dan manfaat media (Hill, 2009), jajak pendapat publik dan survei institusi (Mietzner, 2009), pembabakan dalam internal partai (Tomsa, 2014), berkontribusi pada penguatan politik dinasti/keluarga (Kenawas, 2013).

Elektabilitas seringkali didefinisikan sebagai seberapa dekat seorang kandidat cocok dengan persepsi norma demografis di sebuah negara. Ada pula yang membahas elektabilitas dengan seberapa moderat seorang kandidat secara ideologis. Di satu sisi, demografi dan moderasi cenderung menjadi metode yang paling banyak dibahas untuk memperkirakan elektabilitas. Akan tetapi di sisi lain memperkirakan dengan menggunakan kemampuan kandidat untuk memberi energi kepada pemilih dengan karisma atau kebijakan, kemampuan untuk menggalang dana, pengalaman dan keberhasilan pemilu, citra di media, atau kemampuan kandidat untuk berdebat dan mempertahankan kebijakan mereka.

Dalam pemilihan pendahuluan, pemilih mungkin mempertimbangkan elektabilitas dalam pemungutan suara mereka. Jika pemilih benar-benar mempertimbangkan keterpilihan, maka masing-masing pemilih dapat menentukan secara berbeda siapa yang paling dapat dipilih. Dalam pemilihan umum, pemilih menentukan siapa yang dipilih dengan memilih calon. Dengan demikian,

elektabilitas pada akhirnya adalah keputusan para pemilih.

Beberapa studi menemukan, pemilih mempertimbangkan prospek pemilihan umum dari kandidat partai mereka saat memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan (Adams et al., 160 C.E.; Alan I. Abramowitz, 1989; Rickershauser & Aldrich, 2006; Stone & Abramowitz, 1986; Wattier, 2003). Keyakinan umum, karena pemilih utama secara ideologis lebih ekstrem daripada pemilih pemilihan umum, pemilih utama lebih cenderung menghasilkan kandidat ideologis yang ekstrem yang secara ideologis kurang mirip dengan populasi umum (Alan I. Abramowitz, 1989; Stone & Abramowitz, 1986).

Abramowitz (Stone & Abramowitz, 1986) dan Stone (1989) menggunakan jalur keputusan pemilih untuk mencontohkan perilaku pemilih yang menunjukkan bahwa pendapat pribadi calon memengaruhi persepsi pemilih tentang calon yang paling mungkin memenangkan pemilihan umum. Meskipun pemilih mempertimbangkan elektabilitas kandidat, Adams dan Merrill (2014) menemukan dengan menggunakan model pemilu, memberi suara dengan ideologi atau memilih dengan elektabilitas memiliki efek yang sama pada hasil pemilu.

Wattier (2003) dan Abramowitz dan Stone (1986), menemukan, elektabilitas menjadi indikator terkuat pilihan pemilih. Sementara Rickerharuser dan Aldrich (2007) serta Adams dan Merrill (Adams & Merrill, 2014) menemukan fakta, pemilih menggabungkan isu-isu substantif serta elektabilitas dalam keputusan mereka. Meskipun penelitian berbeda-beda dalam hal pemilih mempertimbangkan elektabilitas, semua penelitian yang relevan telah mendukung, keterpilihan merupakan indikator penting untuk pilihan utama pemilih.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlandaskan paradigma fenomenologi. Pendekatan kualitatif digunakan agar sesuai dengan

tujuan dan kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif, menurut Neuman, berusaha untuk menginterpretasikan data dengan cara memberi arti dan analisis terhadap hasil data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung (Neuman, 2002).

Data dan fakta atas suatu permasalahan yang didapat diproses secara induktif sehingga didapat suatu generalisasi dan gambaran atas permasalahan tersebut (Creswell, 2015). Sebagai metode penelitian, digunakan metode studi kasus. Jika fokus penyelidikan adalah pada peristiwa terkini dalam konteks kehidupan nyata, peneliti memiliki pengaruh terbatas atas peristiwa yang diteliti, dan peneliti memiliki kemampuan minimal untuk memodifikasi peristiwa yang diselidiki, sehingga studi kasus adalah metode yang tepat (Yin, 2014).

Peneliti menggambarkan keberlangsungan dinasti Ratut Atut terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya berfokus pada komunikasi politik yang dijalankan dalam meningkatkan elektabilitas Benyamin-Pilar di Pilkada Tangerang Selatan 2020. Teori dinasti politik digunakan untuk menganalisa fenomena dinasti politik Ratu Atut, sedangkan teori komunikasi politik untuk menganalisa proses komunikasi politik yang dijalankan dalam meningkatkan elektabilitas.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan menentukan *key informant* dan informan sebanyak lima orang, kepustakaan, dan dokumentasi, serta pengumpulan informasi melalui internet, seperti berita dari media, dan jurnal yang relevan. Analisis data digunakan dalam proses reduksi, display, dan verifikasi/kesimpulan (Sugiyono, 2016).

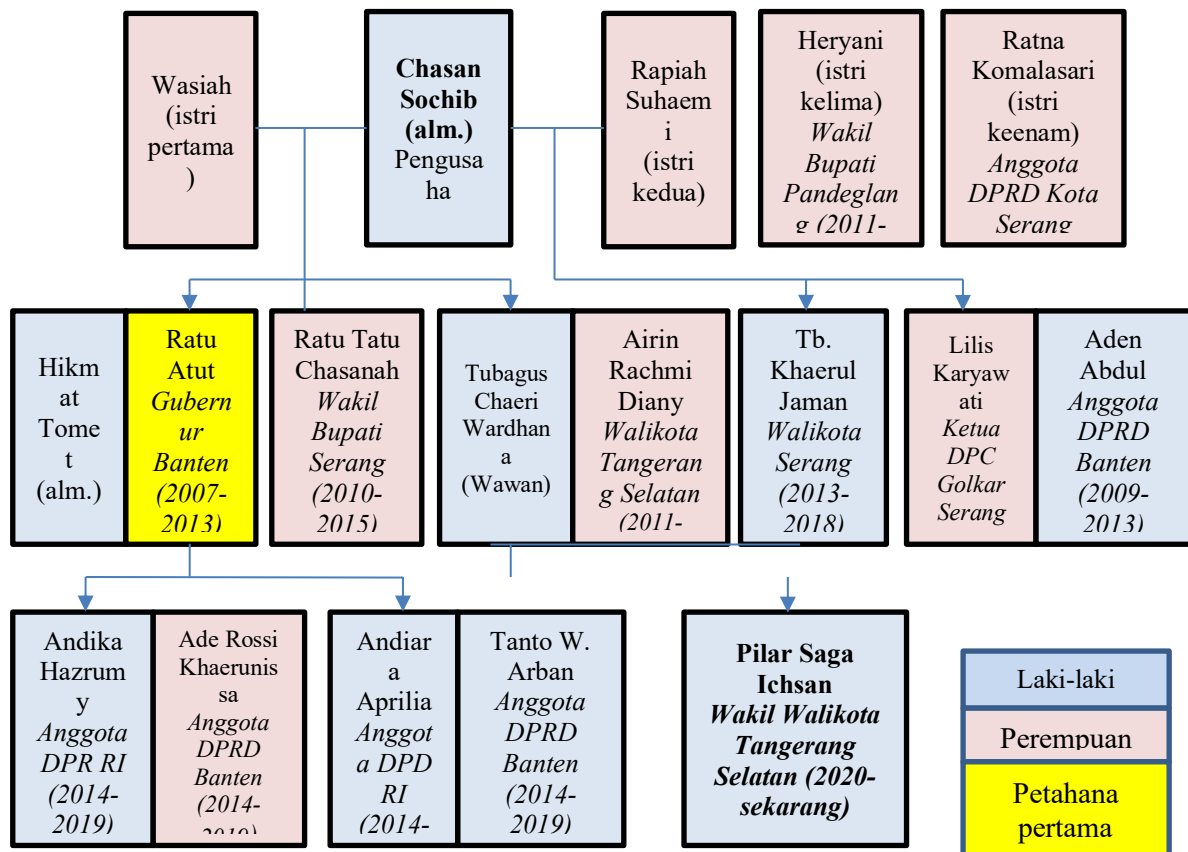
Hasil dan Pembahasan

Sejak Ratut Atut Chosiyah menjadi Gubernur Banten tahun 2007, beberapa

anggota keluarganya menduduki beberapa jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif (Bagan 1). Pada 2008, saudara tiri Ratu Atut, Tubagus Khaerul Jaman, terpilih sebagai Wakil Wali Kota Serang. Pada 2009, enam anggota Dinasti Ratu Atut memenangi pemilihan legislatif dan eksekutif di Banten (Masaaki & Hamid, 2008). Almarhum suami Atut, Hikmat Tomet, menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili Partai Golkar, dan putranya Andika Hazrumy menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Istri Andika, Ade Rossi Khaerunnisa, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang. Ibu angkat Ratu Atut, Ratna Komalasari (istri keenam Haji Chasan, ayah kandung Ratu Atut) jadi anggota DPRD Kota Serang. Selain itu, Abdul Aden Khaliq, adik ipar Atut, menjadi anggota DPRD Banten bersama Ratu Ella Wurella, sepupu Atut. Ibu tiri Ratu Atut lainnya, Heryani Yuhana (istri kelima Haji Chasan) menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Dalam Pemilu 2020, dinasti keluarga Ratu Atut dicalonkan oleh Golkar, kecuali Andika (nonpartisan) dan Ratu Ella Wurella (PDI Perjuangan).

Selanjutnya, Dinasti Ratu Atut memperluas dominasinya di Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Serang. Pada 2010, adik perempuan Ratu Atut, Ratu Tatu Chasanah, terpilih sebagai Wakil Bupati Serang. Pada tahun 2011, Airin Rachmi Diany (adik ipar Ratu Atut) menjadi Walikota Kabupaten Tangerang Selatan. Saudara laki-laki Ratu Atut yang merupakan Wakil Walikota Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman, memenangkan pemilihan walikota 2013 Kota Serang. Berikut adalah bagan politik keluarga Ratu Atut Chosiyah:



Bagan 1. Dinasti Politik Keluarga Ratu Atut Chosiyah

Terlepas dari dominasi dinasti dalam pilkada Tangerang Selatan, tetap ada batasan kekuatan dinasti politik untuk mengkonsolidasikan dan memperluas kekuasaannya. Konsolidasi dan ekspansi dinasti bergantung pada kemampuan dinasti untuk sepenuhnya mengeksploitasi jaringan keluarga informal, untuk mengumpulkan kekayaan materi, dan akhirnya memanipulasi lapangan bermain untuk memberikan keuntungan elektoral bagi anggota keluarga. Di beberapa wilayah, kemampuan dinasti politik untuk menjalankan kekuasaannya secara penuh juga mungkin dibatasi oleh keberadaan dinasti politik lainnya. Terakhir, konsolidasi dan perluasan dinasti dapat terhambat ketika aktor dan otoritas politik nasional mengintervensi atau menerapkan pembatasan baru yang mempersulit para pemimpin dinasti lokal untuk mencalonkan diri dalam pemilihan daerah.

Mengenai kemampuan untuk memanfaatkan jaringan keluarga informal secara penuh, contoh dari dua kabupaten di

Banten menjelaskan tentang keterbatasan jaringan keluarga Dinasti Ratu Atut. Dua anggota Dinasti Ratu Atut berupaya merebut jabatan Bupati Tangerang pada 2008 dan 2012. Kakak ipar Atut, Airin Rachmi Diany (mantan Wali Kota Tangerang Selatan), awalnya kalah melawan *incumbent* Ismet Iskandar pada 2008. Namun, Dinasti Ratu Atut melalui Airin kemudian dapat menduduki kantor wilayah di wilayah Tangerang setelah pemekaran kabupaten tersebut menjadi dua subnasional, yaitu Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dari Airin inilah estafet dinasti keluarga Ratu Atut berlanjut ke Pilar Saga sebagai wakil wali kota terpilih Tangerang Selatan pada Pilkada Tangerang Selatan 2020.

Berlandaskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2020, pasangan

calon (paslon) Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelora menang dengan perolehan suara terbanyak yaitu 235.734 suara.

Adapun Muhamad-Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menempati peringkat kedua dengan 205.309 suara. Sedangkan paslon Siti Nurazzizah-Ruhamaben yang diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduduki peringkat ketiga dengan 134.682 suara.

Dinasti Ratu Atut mendominasi politik di empat kabupaten/kota, yaitu: Kota Serang, Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Pandeglang. Salah satu dinasti keluarga Ratu Atut yang terpilih dalam Pilkada 2020 adalah Pilar Saga Ichsan, sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada pilkada 2020 bersama pasangannya Benyamim Davnie.

Pilar adalah anak dari Bupati Serang, Ratu Tatu, adik kandung Ratu Atut. Adapun Ratu Atut adalah kakak ipar mantan wali kota Tangerang Selatan, Airin. Suami Airin, Tubagus Chaeri Wardana adalah adik Ratu Atut dan Tatu, sedangkan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin, adalah mantan wakil wali kota Tangerang Selatan yang menjabat selama dua periode mendampingi Airin. Benyamin bersama dengan Airin memboyong kemenangan Pilkada Tangsel 2010 dan berturut turut menang Pilkada Tangerang Selatan 2015 untuk kedua kalinya (Kompas.com, 2020).

Para ahli telah menunjuk pada kelembagaan partai yang lemah sebagai penyebab utama berkembangnya dinasti politik. Politisi yang menduduki jabatan terpilih seringkali juga memegang posisi kunci dalam struktur organisasi partai

politik mereka, di tingkat nasional atau subnasional. Menduduki posisi strategis ini dalam struktur partai politik memungkinkan keluarga dinasti dengan mudah mempromosikan dan mencalonkan anggota keluarga dalam pemilihan umum terutama ketika mekanisme promosi dan pencalonan internal tidak jelas atau tidak ditegakkan secara ketat.

Mencalonkan diri sebagai partai politik jauh lebih sederhana daripada mencalonkan diri sebagai calon independen. Begitu pula, parpol kerap mencari dukungan politisi dinasti dalam pemilihan umum. Politisi dinasti terbukti menjadi pengambil suara yang efektif. Berkat koneksi keluarga mereka, mereka juga memiliki sumber daya - uang dan jaringan - untuk menjalankan kampanye secara efektif. Partai politik juga mengharapkan politisi dinasti untuk berkontribusi pada pundi-pundi partai guna mendanai operasional partai sehari-hari di daerah.

Hampir semua keluarga dinasti Ratu Atut adalah anggota dan dicalonkan oleh Golkar. Beberapa dari mereka memegang posisi penting dalam partai, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ratu Atut pernah menjadi Wakil Bendahara 2004-2009 dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Golkar 2009-2014. Almarhum suami Ratu Atut, Hikmat Tomet adalah Ketua Golkar Provinsi Banten periode 2009-2013. Saat meninggal dunia tahun 2013, jabatan tersebut dipindahkan ke Ratu Tatu Chasanah.

Dinasti keluarga Atut dan Golkar tidak bisa dipisahkan. Golkar membutuhkan dinasti keluarga Atut untuk mempertahankan dominasi partai di Banten. Terbukti, total suara anggota dinasti keluarga Ratu Atut sangat tinggi. Di sisi lain, dinasti keluarga Ratu Atut membutuhkan Golkar sebagai kendaraan politik, terutama menjelang pilkada. Anggota keluarga tidak serta merta membutuhkan Golkar sebagai mesin partai, tetapi juga untuk memenuhi persyaratan administrasi pemilihan kepala daerah.

Sementara itu, menurut Siti Nur Azizah, kekerabatanya sebagai putri Wakil Presiden Ma'aruf Amin membantunya memenangkan kontestasi pemilihan di Tangerang Selatan, tetapi itu tidak cukup untuk memenangkan pemilihan.

“Kalau terkait dengan popularitas, iya, itu pasti ada dampak. Itu keberkahan buat kami sebagai putri langsung dari beliau. Itu suatu keberkahan. Tetapi saya rasa itu tidak cukup karena untuk memenangkan itu kan ada beberapa syarat, di antaranya adalah elektabilitas dan akseptabilitas masyarakat (Azizah dalam BBC, 2020).”

Selain itu, setelah kekalahannya, Azizah juga mengklaim bahwa campur tangan politik lokal yang kuat oleh para pesaingnya, yang telah menguasai jaringan politik, sumber daya keuangan, dan program APBD, menjadi salah satu faktor kekalahannya. Azizah tidak mengungkapkan nama penantangannya. Akan tetapi jika melihat tokoh petahana, kompetitor yang dimaksud mengarah kepada Benyamin selaku Wakil Wali Kota Tangsel dan Muhammad, Sekretaris Daerah Tangsel. Jika dikerucutkan kembali, maka Benyamin lah yang paling berpotensi melakukan intervensi politik lokal karena disokong oleh dinasti keluarga Atut yang direpresentasikan oleh Pilar sebagai wakil wali kota.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan popularitas kekerabatan politik yang dimiliki baik oleh Rahayu Saraswati dan Siti Nur Azizah tidak berdampak signifikan dalam perlombaan untuk mengalahkan petahana dinasti keluarga Ratu Atut. Di samping itu, di Tangerang Selatan, politik dinasti bukanlah hal baru, telah mendarah daging setidaknya selama dua dekade terakhir.

Benjamin-Pilar diuntungkan dari empat latar belakang politik di Kota Tangerang Selatan secara bersamaan, yaitu: (1) memiliki hubungan politik kekerabatan atau dinasti politik keluarga selama tiga generasi; (2) partai pengusul petahana, yakni Partai Golkar unggul dalam Pemilu

Legislatif 2014 dan 2019; (3) unggulan Partai Golkar unggul di Pilkada Wali Kota 2010 dan 2015; (5) unggulan Partai Golkar menang di Pilkada Gubernur Banten 2013 dan 2018.

Empat keuntungan latar belakang politik Benyamin-Pilar ini jika dibandingkan dengan satu keuntungan yang dimiliki oleh Siti Nur Azizah dan Rahayu Saraswati, tentu membawa dampak berbeda. Benyamin-Pilar dengan kekuatan politik lokal yang mengakar di Tangerang Selatan, memiliki popularitas dan elektabilitas yang lebih kuat dibanding dengan figur yang baru muncul dengan rekam jejak belum banyak diketahui oleh konstituen.

Menurut Muhammad Ihsan Maulana dari Lembaga Penelitian Konstitusi dan Inisiatif Demokrasi, pengikut Ratu Atut masih kuat di Banten. Ihsan juga mengatakan bahwa jika Pilar tidak mencalonkan di Pemilihan Kepala Daerah Tangsel 2020, maka dia berisiko kehilangan elektabilitas dan momen yang melekat pada Airin, saudara kandung Atut (Kartika et al., 2020).

Keuntungan dinasti politik keluarga, ditegaskan pula oleh akademisi LA. Posisi *privilege* Pilar sebagai dinasti keluarga Ratu Atut di Banten tidak bisa dihindarkan. Beberapa tokoh keluarga, seperti Airin bersama suaminya, Wawan, dan Andika “turun gunung” ke Tangsel. LA meyakini, selain merebut Pilar di Pilkada Tangerang Selatan 2020, keluarga besar Ratu Atut juga akan bersaing memperebutkan kursi di Pemilihan Gubernur 2022.

“Mereka berupaya menggempur Tangerang Selatan dengan satu tujuan: Pilgub Banten 2022. Dalam konteks pemilihan Gubernur, yang menjadi pengikat suara-suara itu ya kepala daerah. Jika Tangsel tidak menang, Pilgub 2022 akan berat bagi Andika. Maka dari itu mereka jor-joran.” (Prabowo & Setiawan, 2020).

Dengan kekuatan politik lokal yang mengakar ini, sejalan dengan kemungkinan

kekuatan intervensi politik yang dapat dilakukan oleh petahana dengan jaringan politik, sumber daya anggaran, hingga program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Faktor ini diakui Azizah sebagai salah satu faktor kekalahannya. Hal serupa juga diyakini Muhamad-Saraswati, meskipun Muhamad mempunyai kemungkinan turut melakukan intervensi mengingat jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Berbeda dengan Azizah-Ruhamaben, faktor kekalahan tambahan Muhamad-Saraswati diduga adalah efek korupsi benih lobster Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang juga merupakan kader Partai Gerindra.

Di bawah dominasi politik di tingkat daerah, persaingan antarcalon yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah juga berlangsung dalam situasi yang kurang adil dan setara. Situasi ini dimungkinkan

karena dominasi dan penguasaan dinasti politik di tingkat daerah, tidak hanya terhadap birokrasi, tetapi juga pada berbagai elemen masyarakat, terkooptasi melalui strategi penyaluran bantuan sosial dan/atau hibah serta pengendalian terhadap para pelaku usaha, dan asosiasi bisnis melalui strategi berbagi proyek pembangunan.

Selain itu terdapat fakta, persaingan cenderung tidak seimbang, sedikit banyak disebabkan oleh kemampuan finansial keluarga dinasti yang pada umumnya lebih melimpah daripada pesaing mereka. Situasi ini menonjol, terutama menjelang pilkada. Kemenangan pemilihan dinasti keluarga Ratu Atut dibantu oleh cadangan keuangan yang cukup besar. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mendukung pernyataan tersebut (Tabel 1).

Tabel 1. Harta Kekayaan Paslon Pilkada Tangerang Selatan 2020

Nomor Urut	Nama Calon	Jumlah Harta Kekayaan
01	MHD	Rp 5.194.398.261
01	RS	Rp 25.531.686.127
02	SNA	Rp 17.011.825.862
02	RHB	Rp 19.750.000.000
03	Bd	Rp 3.484.525.626
03	PS	Rp 28.063.872.562

Sumber: LHKPN 2020

Selain itu, posisi dinasti politik keluarga Ratu Atut sebagai pemegang jabatan telah memberi mereka lebih banyak fleksibilitas daripada para pesaingnya. Mereka tidak hanya mendistribusikan proyek pemerintah kepada perusahaan keluarga, tetapi sebagai pejabat publik juga memiliki fleksibilitas mengeksploitasi anggaran negara untuk mendukung kampanye, melalui alokasi bantuan preferensial yang diarahkan ke berbagai organisasi sosial di bawah perlindungan dinasti politik. Diduga, sebagian besar uang dari berbagai program bantuan sosial ini digunakan untuk membiayai kampanye (Kenawas, 2015).

Dengan kekayaan keluarga dan kemampuan memanipulasi anggaran

pemerintah, memudahkan dinasti untuk membiayai kampanye anggota keluarganya. Kekayaan keluarga sangat berguna untuk mendapatkan dukungan dari partai politik dan mendanai operasi kampanye, termasuk untuk pembelian suara dan cara ilegal lainnya.

Terlepas dari tim sukses, fenomena Tim Hiu dan jaringan yang dibentuk oleh keluarga dinasti mencoblos pemilih di setiap pemilu, dilaksanakan strategi komunikasi dengan memanfaatkan jejaring dengan memanfaatkan koneksi fungsional lembaga birokrasi atau organisasi masyarakat sipil melalui jaringan birokrasi dan/atau organisasi masyarakat sipil.

Trik politik uang juga dilakukan di tingkat akar rumput melalui jaringan figur

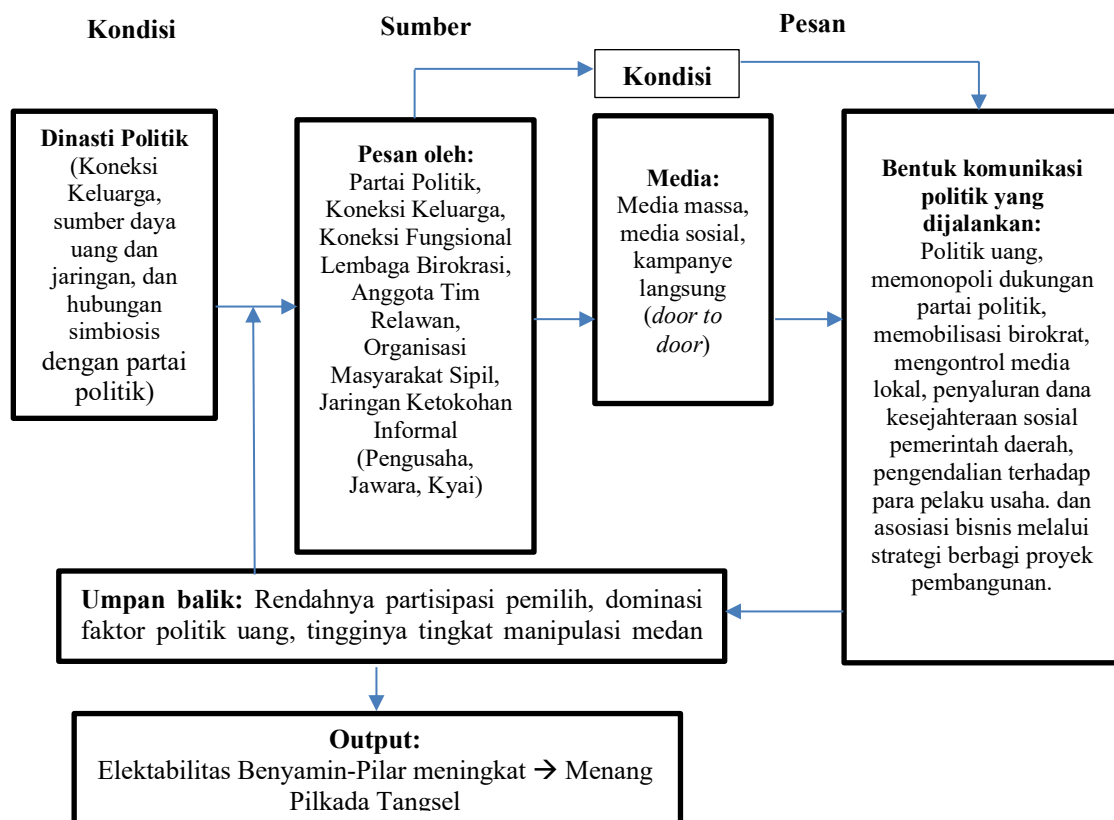
formal dan informal (Nurmandi et al., 2017). Di antara tokoh formal, kepala desa berfungsi penting dalam mendistribusikan politik uang kepada pemilih, sedangkan di kalangan pemimpin informal, pengusaha, jawara, bahkan kyai merupakan simpul penting penyaluran politik uang.

Sementara itu, calon oposisi, pendukung oposisi, pejabat penyelenggara pemilu lokal, dan birokrasi lokal yang tidak mendukung anggota dinasti dilaporkan mendapat intimidasi dari pihak tak dikenal (Kenawas, 2015). Besaran *money politics* sangat bervariasi, berkisar antara Rp 20.000 - Rp 100.000 per pemilih. Politik uang meluas ke pemilih melalui jaringan administrator dan anggota tim sukarelawan yang diorganisir oleh politisi dinasti.

Fenomena di atas mencerminkan komunikasi politik yang telah dijabarkan pada kerangka teori. Komunikasi politik, menurut Craig Allen Smith, adalah proses negosiasi orientasi komunitas melalui

interpretasi dan karakterisasi kepentingan, relasi kuasa, dan peran komunitas di dunia (Denton & Woodward, 1998). Definisi ini menjelaskan bagaimana proses negosiasi suatu komunitas tentang kepentingan hubungan kekuasaan terjadi. Dalam proses ini, terjadi tarik-menarik orientasi melalui proses interpretasi minat. Proses negosiasi dapat terjadi dengan sangat cepat tetapi dapat juga sangat lambat, tergantung pada peran yang dimainkan para aktor dalam masyarakat, selain kemampuan mereka menerjemahkan kepentingan dalam relasi kekuasaan mereka.

Selain proses negosiasi, komunikasi politik juga diartikan sebagai proses interaksi migrasi informasi antara politisi, media berita, dan publik (Smelser & Baltes, 2001). Proses komunikasi politik berjalan dalam lingkungan dinasti politik, dengan berbagai dampak atau umpan balik dengan menggunakan proses komunikasi politik Smelser dan Bales (Bagan 2):



Bagan 2. Komunikasi Politik Dinasti Keluarga Ratu Atut dalam Meningkatkan Elektabilitas Benyamini-Pilar di Pilkada Tangerang Selatan, 2020

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

Pertama, Benjamin-Pilar yang muncul dari dan/atau menjadi kekuatan politik lokal di Tangerang Selatan, menikmati popularitas dan elektabilitas lebih besar daripada sosok yang baru berkembang dengan *track-record* yang belum banyak diketahui oleh konstituen.

Kedua, Benyamin-Pilar dengan dukungan dinasti keluarga Ratu Atut, memiliki keunggulan berupa koneksi keluarga, sumber daya uang dan jaringan, serta hubungan simbiosis dengan partai politik, sehingga memiliki lebih banyak pembawa pesan dalam komunikasi politik yang dijalankan.

Ketiga, para komunikator (keluarga dinasti Ratu Atut) memanfaatkan media massa, media sosial, dan kampanye langsung (*door to door*) untuk menjalankan berbagai bentuk komunikasi politiknya selama pemilihan kepala daerah berlangsung seperti politik uang, memonopoli dukungan partai politik, memobilisasi birokrat, mengontrol media lokal, penyaluran dana kesejahteraan sosial pemerintah daerah, pengendalian terhadap para pelaku usaha, dan asosiasi bisnis melalui strategi berbagi proyek pembangunan.

Keempat, faktor politik uang mendominasi kesediaan warga/pemilih untuk memilih, bukan karena kesadaran yang terbangun oleh derajat literasi politik yang memadai.

Daftar Pustaka

- Adams, J., & Merrill, S. (2014). Candidates' Policy Strategies in Primary Elections: Does Strategic Voting by the Primary Electorate Matter? *Public Choice*, 160(1/2), 7–24.
- Adams, J., & Merrill, S. (160 C.E.). Candidates' Policy Strategies in Primary Elections: Does Strategic Voting by the Primary Electorate Matter? *Public Choice*, 1/2, 7–24.
- Alan I. Abramowitz. (1989). Viability, Electability, and Candidate Choice Election: A Test of Competing Models. *The Journal of Politics*.
- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015). Dynastic politicians: Theory and evidence from Japan. *Japanese Journal of Political Science*, 16(1), 5–32. <https://doi.org/10.1017/S146810991400036X>
- Bayu, D. J. (2020). *Berjayanya Dinasti Politik di Pilkada 2020*. Katadata.Co.Id.
- Blumler, J. G., Blumler, J., & Gurevitch, M. (1995). *The Crisis of Public Communication* (Routledge (Ed.)).
- Bó, E. D. A. L., Bó, P. D. A. L., & Snyder, J. (2009). Political Dynasties. *Review of Economic Studies*, 76, 115–142.
- Budiyono, N. (2017). Politik Dinasti dalam Pemberitaan Media (Analisis Framing Isu Politik Dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Pada Harian Kompas dan Koran Tempo). *Jurnal Iptekkom: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 18(2), 160. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.18.2.2016.160-173>
- Buehler, M. (2009). The Rising Importance of Personal Networks in Indonesian Local Politics. In *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)* (pp. 101–124). ISEAS Publishing.
- Creswell, J. W. (2015). *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. Sage.
- Denton, R. E., & Woodward, G. C. (1998). *Political Communication in America* (3rd ed.). Preager.
- Fagen, R. R. (1966). *Politics and Communication* (L. B. and Company (Ed.)).
- Gonzales, A., & Tanno, D. V. (1997). *Politics, Communication, and Culture*. Sage Publications.
- Hess, S. (1966). *America's political dynasties from Adams to Kennedy* (1st ed.). Doubleday & Company, Inc.
- Hidayat, S. (2009). Pilkada, Money Politics

- and the Dangers of “Informal Governance” Practices. In P. Sulistiyanto & M. Erb (Eds.), *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)* (pp. 125–146). ISEAS.
- Hill, D. T. (2009). Assessing Media Impact on Local Election in Indonesia. In P. Sulistiyanto & M. Erb (Eds.), *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)* (pp. 229–258). ISEAS.
- Ishibashi, M., & Reed, S. R. (1992). Second-Generation Diet Members and Democracy in Japan: Hereditary Seats. *Asian Survey*, 32(4), 66–379. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2645152>
- Ispandriarno, L. S. (2008). *Political Communication in Indonesia An Analysis of the Freedom of the Press in the Transition Process after the Downfall of the Soeharto-Regime (1998-2004)*. Technical University of Ilmenau.
- Kartika, M., Akbar, N. A., Saputro, F. A., Sholikhah, B., & Antara. (2020). *Pilkada Banten yang tak Putus dari Dinasti Ratu Atut*. Republika.Co.Id.
- Kenawas, Y. C. (2013). *The Rise of Political Dynasties in Decentralized Indonesia*. Nanyang Technological University.
- Kenawas, Y. C. (2015). The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society. *EDGS Working Paper - Arryman Fellow*, 22, 1–58.
- Kompas.com. (2020). *Pilkada Tangsel 2020, Dinasti Politik, dan Pekerjaan Rumah yang Menanti*. Kompas.Com.
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the cold war*. Cambridge University Press.
- Masaaki, O., & Hamid, A. (2008). Jawara in Power, 1999–2007. *Indonesia*, 109–138.
- McNair, B. (1999). *An Introduction to Political Communication* (2nd ed.). Routledge.
- McNair, B. (2017). An introduction to political communication: Sixth edition. *An Introduction to Political Communication: Sixth Edition*, 1–251. <https://doi.org/10.4324/9781315750293>
- Mietzner, M. (2009). Autonomy, Democracy and Internal Conflict: The 2006 Gubernatorial Elections in Papua. In M. Erb & P. Sulistiyanto (Eds.), *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)* (pp. 259–282). ISEAS.
- Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Nurmandi, A., Martada, A., Tamronglak, A., Singh, B., Mutiarin, D., Farez, D. AL, Choi, J. W., Hubacek, K., Anand, P. ., Kim, S. H., Titin Purwaningsih (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, I., Sataporn Roengtam (Khon Khaen University, T., Somkid Chiangmai (Maejo University, T., Eko Priyo Purnomo (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, I., Chi-fun Hung (National Cheng Kung University, T., Non Naprathansuk (Maejo University, T., Christopher A. Woodrich (Gadjah Mada University, I., & Rijal Ramdani (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, I. (Eds.). (2017). *Shifting Dynamics of Social Politics: The Implication for Policy Making and Community Empowerment*. Jusuf Kalla School of Government (JKSG).
- Prabowo, H., & Setiawan, R. (2020). *Pilkada Tangsel: Trah Ma'ruf & Prabowo Kalah oleh Dinasti Ratu Atut*. Tirto.Id.
- Querubin, P. (2011). Political reform and elite persistence: Term limits and political dynasties in the Philippines. *Mimeo*.
- Rickershauser, J., & Aldrich, J. H. (2006).

- It's the Electability, Stupid—or Maybe Not? Electability, Substance, and Strategic Voting in Presidential Primaries. *Electoral Studies*.
- Rickershauser, J., & Aldrich, J. H. (2007). It's the Electability, Stupid—or Maybe Not? Electability, Substance, and Strategic Voting in Presidential Primaries. *Electoral Studies*, 26, 371–380.
- Rosit, M. (2012). *Strategi Komunikasi Politik dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan Pasngan Kandidat Ratu Atut dan Rano Karno pada Pilkada Banten 2011)*.
- Salam, T. B. (2016). *Sustainibilitas Pembangunan Politik Dinasti Ratu Atut Chosiah di Banten*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Smelser, N. J., & Baltes, P. B. (2001). *International encyclopedia of the social & behavioral sciences*. Elsevier.
- Stone, W. J., & Abramowitz, A. I. (1986). Ideology, Electability, and Candidate Choice.” Dalam *The Life of the Parties, Activists in Presidential Politics*. University Press of Kentucky, 75–96.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna, A. (2017). Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329>
- Thompson, M. R. (2012). Asia's Hybrid Dynasties. *Asian Affairs*, 43, 204–220.
- Tomsa, D. (2014). Party System Fragmentation in Indonesia: The Subnational Dimension. *Journal of East Asian Studies*, 14, 249–278.
- Wattier, M. J. (2003). 'Vote for Me, I Can Win': Electability. *Republican Presidential Primaries*.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods (5th ed.)*. In Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.